

**PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH**

**Skripsi
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1**

Program Studi Manajemen



**Disusun oleh:
Selia Meilina
NIM. 30402400097**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2025**

SKRIPSI

PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Disusun Oleh :

Selia Meilina

NIM : 30402400097

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan kehadapan sidang
panitia ujian usulan penelitian Skripsi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

جامعة سلطان احمد الإسلامية

Semarang, 12 November 2025

Pembimbing,



Dr. Lutfi Nurcholis, S.T., S.E., M.M.
NIDN : 0623036901

PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Disusun oleh:

Selia Meilina

30402400097

Pada tanggal, 12 November 2025

Susunan Dewan Pengaji

Pembimbing

Dr. Lutfi Nurcholis, S.T., S.E., M.M.

NIK. 0623036901

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Manajemen

Mengetahui,

Ketua Program Studi Manajemen



Dr. Lutfi Nurcholis, S.T., S.E., M.M.

NIK : 0623036901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Selia Meilina
NIM : 30402400097
Program studi : S1 Manajemen
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH”** merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarisme dengan cara yang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam penelitian ini.



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selia Meilina

NIM : 30402400097

Program Studi : S1 Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyerahkan hasil karya ilmiah berupa Tugas Akhir Skripsi dengan judul:

“PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksekutif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya tulis ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 November 2025
Yang Memberi Pernyataan



SELIA MEILINA
NIM. 30402400097

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Regional Property Administration (BMD) and the Government Internal Control System (SPIP) on the Quality of Financial Statements of the Central Java Provincial Government, both partially and simultaneously. The research is grounded in Stewardship Theory, which emphasizes the moral responsibility of government officials in managing public resources transparently and accountably. This study employs a quantitative method with an explanatory approach. The population includes employees of Regional Apparatus Organizations (OPD) who serve as asset managers, financial report preparers, and SPIP assessors, with a total sample of 126 respondents selected through purposive sampling. Data were collected using questionnaires and analyzed using multiple linear regression with the help of SPSS software. The results show that: (1) BMD administration has a significant effect on the Quality of Financial Statements (significance value 0.003; t-count 3.025 > t-table 1.979); (2) SPIP has a significant effect on the Quality of Financial Statements (significance value 0.000; t-count 5.468 > t-table 1.979); and (3) simultaneously, both variables have a significant effect (F-count 80.974 > F-table 3.92; significance 0.000). The coefficient of determination (R^2) of 0.568 indicates that 56.8% of the variation in Financial Statement Quality is explained by these two variables. The findings confirm that better regional asset administration and more effective internal control implementation lead to higher-quality government financial reports. This study is expected to serve as a reference for strengthening transparent and accountable public financial governance. The limitation lies in the restricted independent variables and the use of self-assessment, which may lead to subjective bias.

Keywords: *Regional Property Management, Government Internal Control System, Financial Statement Quality, Stewardship Theory.*



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, baik secara parsial maupun simultan. Landasan teori yang digunakan teori Stewardship yang menekankan tanggung jawab moral aparatur pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori. Populasi penelitian mencakup pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan sebagai pengurus barang, penyusun laporan keuangan, dan asesor SPIP, dengan jumlah sampel 126 responden yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis melalui regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penatausahaan BMD berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (nilai signifikansi 0,003; t hitung $3,025 > t$ tabel 1,979); (2) SPIP berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (nilai signifikansi 0,000; t hitung 5,468 $> t$ tabel 1,979); dan (3) Secara simultan, keduanya berpengaruh signifikan (F hitung 80,974 $> F$ tabel 3,92; signifikansi 0,000). Nilai R^2 sebesar 0,568 menunjukkan bahwa 56,8% variasi Kualitas Laporan Keuangan dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Hasil ini menegaskan bahwa semakin baik penatausahaan aset daerah dan penerapan SPIP, semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam penguatan tata kelola keuangan publik yang transparan dan akuntabel. Keterbatasannya terletak pada variabel yang terbatas serta penggunaan self-assessment yang berpotensi menimbulkan bias subjektivitas.

Kata kunci: Penatausahaan Barang Milik Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan, Teori Stewardship.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah”**

Laporan skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung. Selama proses bimbingan proposal skripsi peneliti mendapatkan motivasi, serta dukungan dari pihak lain, oleh sebab itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Heru Sulistyo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
2. Bapak Dr. Lutfi Nurcholis, S.T., S.E., M.M. selaku Kepala Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Bapak Dr. Lutfi Nurcholis, S.T., S.E., M.M. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi dalam menyusun proposal penelitian ini,

4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pengajaran bekal ilmu pengetahuan serta seluruh staf
5. tata usaha dan perpustakaan atas segala bantuan selama proses penyusunan proposal penelitian ini hingga selesai,
6. Orang tua penulis, ibu Siti Nurati dan Ayah Alm Bambang Suseno yang selalu memberikan semangat dan support kepada penulis untuk terus berusaha untuk menggapai cita-cita. Semoga ibu penulis selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia akhirat selalu. Dan untuk ayah penulis, semoga amal ibadahnya diterima serta diberikan tempat yang indah di sisi Allah SWT.
7. Kakak penulis Amelia Anggraeni, S.Ak. Saudara satu-satunya penulis yang selalu mendukung dan memberikan saran-saran dalam segala hal untuk menggapai cita-cita
8. Seseorang yang tak kalah penting dalam kehidupan penulis, Lettu Laut (P) M. Faisal Safiudin, S.Tr.Pel. telah berkontribusi banyak dalam menyelesaikan skripsi ini, memberikan dukungan baik tenaga, waktu maupun materil. Terimakasih telah menjadi bagian hidup penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih diperlukan saran dan kritik untuk membangun penyusunan yang baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang memerlukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	<i>i</i>
LEMBAR PENGESAHAN.....	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<i>iv</i>
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	<i>v</i>
<i>ABSTRACT</i>	<i>vi</i>
ABSTRAK.....	<i>vii</i>
KATA PENGANTAR.....	<i>viii</i>
DAFTAR ISI.....	<i>x</i>
DAFTAR TABEL	<i>xiii</i>
BAB I.....	<i>1</i>
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II.....	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Teori Stewardship	7
2.1.2 Barang Milik Daerah	8
2.1.3 Penatausahaan Barang Milik Daerah	10
2.1.4 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	13
2.1.5 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	15
2.1.6 Pengelolaan Keuangan Daerah	17
2.2 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Kerangka Berpikir.....	25
2.4 Hipotesis	28
BAB III.....	30

3.1	Jenis Penelitian.....	30
3.2	Populasi dan sampel	31
3.2.1	Populasi	31
3.2.2	Sampel	31
3.3	Jenis dan Sumber Data	32
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	33
3.5	Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	34
3.5.1	Variabel Dependen (Y).....	34
3.5.2	Variabel Independen (X)	35
3.6	Teknik Analisis Data.....	39
3.6.1	Uji Statistik Deskripstif.....	39
3.6.2	Uji Kualitas Data.....	39
3.6.3	Uji Asumsi Klasik.....	41
3.6.4	Model Regresi Linear Berganda	44
BAB IV	48	
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	48
4.2	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	52
4.3	Hasil Analisis Data.....	54
4.3.1	Hasil Uji Kualitas Data.....	54
4.3.1.1	Hasil Uji Validitas	54
4.3.1.2	Hasil Uji Reabilitas.....	56
4.3.2	Hasil Uji Asumsi Klasik	57
4.3.2.1	Uji Normalitas	57
4.3.2.2	Uji Multikolinearitas.....	58
4.3.2.3	Uji Heterokedastisitas	59
4.3.3	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	60
4.3.4	Hasil Uji Hipotesis	63
4.3.4.1	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	63
4.3.4.2	Hasil Uji F Simultan	64
4.3.4.3	Hasil Uji t Parsial.....	65
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian	67
4.4.1	Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	67
4.4.2	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	69

4.4.3 Pengaruh Pengaruh Secara Simultan Antara Penatausahaan BMD Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	71
BAB V.....	73
PENUTUP.....	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Keterbatasan Penelitian	74
5.3 Saran Penelitian.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR LAMPIRAN.....	80



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Peneliti Terdahulu	20
Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran variabel.....	37
Tabel 4.1 Statistik deskritif	52
Tabel 4.2 Hasil Uji Validasi.....	55
Tabel 4.3 Hasil Uji Reabilitas	56
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas.....	58
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas	59
Tabel 4.6 Regresi Linier Berganda.....	61
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi	63
Tabel 4.8 Hasil Uji F Simultan.....	64
Tabel 4.9 Hasil Uji t Parsial	65



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan hal penting untuk mewujudkan tata kelola yang baik (good governance). Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan . Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan yang mengandung informasi yang andal dan berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas mencerminkan tertib pengelolaan keuangan dalam suatu daerah yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan akan menghasilkan opini, apabila laporan keuangan tersebut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) artinya laporan keuangan disajikan dan diungkapkan wajar dan berkualitas. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menetapkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi empat karakteristik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memperoleh opini WTP dari BPK selama 13 tahun berturut-turut hingga pemeriksaan tahun 2024, menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap SAP. Namun demikian, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada periode 2019 – 2023 mencatat sejumlah permasalahan yang berulang dalam penatausahaan BMD, antara lain informasi di Kartu Inventaris Barang (KIB) belum sepenuhnya valid, aset belum tercatat dalam aplikasi SimAset, aset tidak diketahui keberadaannya, pencatatan aset tidak dilakukan secara tertib, dan belum dilakukan pemasangan dan/atau pembaharuan Kartu Inventaris Barang (KIR), aset tetap telah dikuasai dan digunakan SKPD namun belum tercatat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun laporan keuangan telah memenuhi standar penyajiannya, ketidaktertiban dalam penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) masih menjadi isu strategis yang berpotensi menurunkan kualitas informasi keuangan di masa mendatang.

Penatausahaan BMD sendiri diatur dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, yang meliputi tiga kegiatan pokok: pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Selain itu, Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 sebagai perubahan dari Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menegaskan bahwa pengelolaan BMD mencakup seluruh siklus aset mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, hingga penghapusan dan pengawasan. Ketidaktertiban dalam aspek-aspek ini dapat menimbulkan ketimpangan nilai aset dan memengaruhi integritas neraca pemerintah daerah.

Selain penatausahaan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, merupakan faktor krusial dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi. Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah merupakan penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Evaluasi maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah oleh BPKP menunjukkan bahwa pada tahun 2023 tingkat maturitas baru mencapai level 3 dari skala 5 yaitu 3,464. Hal ini mengindikasikan organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum ada evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risikp tersebut.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa penatausahaan aset dan SPIP memiliki hubungan yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan antara lain, (Irfansyah and Septariani 2023) dalam jurnal ilmiah Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam hal ini mengambil studi kasus pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, menunjukkan hasil penatausahaan barang milik daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu (Widiati, Nugraha, and Novianty 2021) dalam jurnal Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan dengan tingkat pengaruh sebesar 57,4%. Selain itu (Fitrania et al. 2022) dalam jurnalnya Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Palembang menunjukkan bahwa cara simultan, variabel penatausahaan aset, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai adjusted R square sebesar 0,283.

Dalam konteks Provinsi Jawa Tengah, meskipun opini WTP telah diperoleh secara konsisten, fakta bahwa masih ditemukan permasalahan dalam penatausahaan BMD menandakan bahwa perlu dilakukan penguatan terhadap sistem penatausahaan aset dan sistem pengendalian intern. Hal ini menjadi penting mengingat BMD merupakan sumber daya yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Setiap perangkat daerah sebagai pengguna barang

berkewajiban menyusun laporan semesteran sebagai bahan penyusunan neraca SKPD dan LKPD.

Berdasarkan uraian di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian tentang “Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah”, penelitian ini akan dilakukan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah secara signifikan Penatausahaan Barang Milik Daerah berpengaruh terhadap Laporan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?
- 2) Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?
- 3) Apakah penatausahaan BMD dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis pengaruh penatausahaan Barang Milik Daerah terhadap Laporan Keungan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- 2) Untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Mengetahui pengaruh secara simultan antara penatausahaan BMD dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan dalam mengembangkan literatur khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

- 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memperbaiki sistem penatausahaan barang milik daerah serta memperkuat sistem pengendalian internal guna meningkatkan penyajian laporan keuangan yang lebih berkualitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stewardship

Teori Stewardship merupakan teori yang dikembangkan oleh Donaldson dan Davis (1991) didasarkan pada asumsi filosofis tentang sifat manusia. Teori Stewardship adalah reaksi dari lemahnya teori *agency* yang menilai indivisu selalu bertindak berdasarkan kepentingan pribadi, berbanding terbalik dengan teori Stewardship dimana seorang pemimpin atau manajer lebih mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan individu. Dalam teori tersebut dijelaskan tentang sikap atau perilaku manajemen ketika mengambil langkah dan keputusan yang tepat dengan memperhitungkan kepentingan para stakeholder internal maupun eksternal sehingga dalam pencapaian tujuannya berorientasi pada kepentingan organisasi (Saputra et al., 2020).

Stewardship Theory dapat diadaptasi pada organisasi sektor publik yaitu di pemerintahan (Eksandy et al., 2020). Dalam konteks pemerintah daerah, teori ini menjelaskan bahwa Aparatur Pemerintah berperan sebagai steward (pengelola) yang dipercaya publik untuk mengelola sumber daya publik. Ketika pemerintah daerah menunjukkan integritas dan kompetensi

dalam melaksanakan penatausahaan BMD dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan menjadi meningkat dan berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan, karena aparatur tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban administrative namun juga merupakan wujud pengabdian untuk menjaga kepentingan public.

2.1.2 Barang Milik Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi, barang yang diperoleh dari hibah, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah, atau barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi , dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset dibagi menjadi beberapa kategori meliputi :

- 1) Aset Tetap merupakan Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap juga dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu aset tetap Intrakomptabel dan aset tetap ekstrakomptabel. Aset tetap instrakomptabel adalah barang milik daerah berupa aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, sedangkan aset tetap ekstrakomptabel adalah barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- 2) Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 3) Aset Lainnya merupakan kelompok aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar dan aset tetap. Aset lainnya meliputi aset tak

berwujud, Aset kerjasama dengan pihak ketiga, serta aset tetap yang dihentikan penggunaanya. Aset tak berwujud yaitu aset yang tidak memiliki wujud fisik namun memiliki nilai seperti hak paten, hak cipta, dan merk dagang. Sedangkan aset kerjasama dengan pihak ketiga merupakan aset yang dikerjasamakan antara pemerintah dengan pihak ketiga. Dan aset tetap yang dihentikan penggunaanya artinya aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi untuk menuju tugas pokok dan fungsi pemerintah, sepertinya contohnya aset rusak berat.

2.1.3 Penatausahaan Barang Milik Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penatausahaan BMD merupakan siklus pengelolaan BMD yang bertujuan untuk menjamin keakuratan dan keandalan informasi mengenai keberadaan, nilai, kondisi, dan status hukum BMD untuk dapat disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah secara memadai. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan

Pelaporan Barang Milik Daerah, kegiatan penatausahaan barang milik daerah yaitu :

- 1) Pembukuan Barang Milik Daerah adalah kegiatan mencatat seluruh kronologi dimulai dari perolehan BMD, mutasi, hingga penghapusan BMD kedalam dokumen administrasi yang sah seperti Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Daftar Barang. Pembukuan tersebut dimaksudkan agar seluruh barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang, maupun kuasa pengguna barang dapat tercatat secara sistematis. Tujuan dilakukan pembukuan terhadap barang milik daerah untuk menjamin keabsahan status kepemilikan aset pemerintah daerah sehingga dapat menciptakan tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah dan menyediakan data aset daerah yang akurat. Transaksi pembukuan barang milik daerah mencakup beberapa hal yaitu, perolehan/penerimaan, penggunaan, penerimaan internal pengguna barang, pengeluaran internal pengguna barang, pemanfaatan, reklasifikasi, koreksi, penambahan masa manfaat, penyusutan, persediaan, pemeliharaan, KIR, pengamanan, penghapusan, KIBAR, dan daftar barang.
- 2) Inventarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan dan pengecekan secara menyeluruh terkait keberadaan, jumlah, dan kondisi fisik seluruh aset milik pemerintah daerah. Tujuan Inventarisasi BMD untuk mengetahui kondisi fisik aset secara riil dan kesesuaianya

dengan pencatatan sehingga umur ekonomis aset daerah tersebut dapat diketahui, selain itu inventarisasi barang milik daerah juga bertujuan untuk mencegah kehilangan aset dan pemanfaatan aset yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan inventarisasi BMD dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali pada aset persediaan dan kontruksi dalam penggerjaan, dan 5 (lima) tahun sekali terhadap aset selain persediaan dan kontruksi dalam penggerjaan. Tahapan inventarisasi BMD dimulai dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan hasil inventarisasi, dan tindak lanjut hasil inventarisasi.

- 3) Pelaporan Barang Milik Daerah merupakan kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi secara tertulis terhadap data aset pemerintah daerah yang telah dilakukan pembukuan dan inventarisasi BMD yang dilakukan oleh Pengurus Barang Pembantu, Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pengelola dalam bentuk laporan barang milik daerah. Tujuan dilakukan pelaporan barang milik daerah agar semua data dan informasi terkait barang milik daerah dapat disajikan dengan akurat sesuai kondisi riil saat ini untuk bahan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah serta mendukung dalam proses pengawasan oleh APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dan audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Jenis laporan barang milik daerah yaitu laporan bulanan dan laporan semesteran.

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP terdiri atas unsur-unsur :

1) Lingkungan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat, melalui :

- (1). Penegakan integritas dan nilai etika
- (2). Komitmen terhadap kompetensi
- (3). Kepemimpinan yang kondusif

- (4). Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
 - (5). Pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
 - (6). Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
 - (7). Perwujudan peran apparat pengawasan ntern pemerintah yang efektif
 - (8). Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
- 2) Penilaian Risiko
- Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.
- 3) Kegiatan Pengendalian
- Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.
- 4) Informasi dan Komunikasi
- Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.
- 5) Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

2.1.5 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah bentuk dari pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan maupun belanja negara yang disusun oleh pemerintah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan informasi terkait posisi keuangan Pemerintah Daerah secara akuntabilitas dan transparan kepada publik, menjadi bahan dasar untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dan dapat digunakan untuk mendukung proses pengambilan kebijakan fiskal dan anggaran. Laporan keuangan Pemerintah daerah disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah anggaran berakhir. Komponen-komponen laporan keuangan yang perlu ada pada laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yaitu :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) : menyajikan perbandingan antara anggaran dengan realisasi sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur yang harus ada antara lain pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/deficit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) : menyajikan saldo anggaran lebih dari awal hingga akhir periode. Unsur-unsur yang perlu ada antara lain Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal, penggunaan SAL, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, SAL akhir.
- 3) Laporan Operasional (LO) : Laporan yang menyajikan informasi mengenai semua kegiatan operasional. Elemen yang perlu ada dalam laporan operasional yaitu Pendapatan LO, Beban Lo, Surplus/deficit dari kegiatan operasional.
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) : Laporan yang menyajikan peningkatan atau penurunan laba rugi selama satu periode
- 5) Neraca : Menyajikan informasi keuangan mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas
- 6) Laporan Arus Kas (LAK) : laporan yang menyajikan informasi mengenai keluar masuknya kas dari adanya aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) : Penjelasan tambahan atas posisi laporan utama termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan dan informasi tambahan lainnya agar pengguna informasi laporan keuangan lebih mudah memahaminya. (tambahan tentang pemeriksaan BPK)

2.1.6 Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Karakteristik pengelolaan keuangan negara merupakan ciri-ciri atau syarat yang perlu diwujudkan agar informasi keuangan dapat digunakan secara optimal oleh pengguna informasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan terdapat empat karakteristik yang perlu dipenuhi agar laporan keuangan dikatakan berkualitas yaitu :

- 1) Relevan

Sesuatu dikatakan relevan apabila mampu mempengaruhi keputusan alokasi sumber daya, yaitu kapabilitasnya dalam membuat suatu keputusan berbeda (Financial Accounting Standards Board: 1980).

Laporan keuangan yang relevan apabila informasi yang termuat dapat mempengaruhi keputusan penggunanya dengan ketepatan waktu, daya prediksi, dan daya konfirmasi terhadap kejadian di masa lalu, kondisi saat ini, serta proyeksi keadaan di masa depan. Karakteristik informasi yang relevan menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu, dan lengkap.

2) Andal

Informasi keuangan harus dapat diandalkan artinya informasi laporan keuangan yang disajikan harus bebas dari kesalahan material dan penyajian yang menyesatkan, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dasar dalam pengambilan keputusan. Informasi mungkin relevan, tetapi jika penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut dapat menyesatkan. Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah informasi yang andal memenuhi karakteristik :

(1). Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan

(2). Dapat Diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang sama.

(3). Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak lain.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan perlu disusun dengan standar yang konsisten setiap periode dan antar entitas sehingga laporan keuangan akan lebih berguna dan dapat dibandingkan. Perbandingan dapat dilakukan secara internal apabila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama tiap tahunnya, sedangkan perbandingan secara eksternal yaitu membandingkan laporan keuangan entitas satu dengan entitas lainnya, dilakukan apabila kedua entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Tujuan melakukan perbandingan laporan keuangan yaitu untuk mengidentifikasi aktivitas keuangan pemerintah, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kondisi keuangan. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang

lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4) Dapat Dipahami

Laporan keuangan yang disajikan harus jelas dan mudah dipahami oleh pengguna serta dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna tanpa menghilangkan informasi yang kompleks. Untuk itu diasumsikan bahwa pengguna laporan keuangan memiliki pemahaman yang memadai tentang aktivitas pemerintahan dan akuntansi pemerintahan tetap menjadi dasar, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ringkasan Peneliti Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
(Maulana 2022)	Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang	Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penatausahaan Aset tetap terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknis analisis data menggunakan statistik inferensial	Dapat disimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan Kota Palembang.

Wini Widiati, Arie Apriadi Nugraha , Ira Noviant y (2021)	Pengaruh Penatausahaan an Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung	Untuk mengetahui pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung	Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan metode deskriptif verifikatif	Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan dengan tingkat pengaruh sebesar 57,4%
Ahmad Irfansya h dan Jumania Septaria ni (2022)	Pengaruh Penatausahaan an Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin)	Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam studi kasus pada secretariat DPBD Kabupaten Musi Banyuasin)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausalitas	variabel Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD)
Silvi Fitria, Khaerul Umam, Ai Siti	Pengaruh Penatausahaan an Barang Milik Daerah Terhadap	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh penatausahaan	Untuk mendukung analisis penelitian, peneliti menggunakan	Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada pengaruh penatausahaan barang milik

Farida (2022)	Kualitas Laporan Bappelitbangda Kabupaten Bandung	barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan Bappelitbangda Kabupaten Bandung.	statistik deskriptif dengan alat uji program Statistical Product and Service Solutions (SPSS)	daerah terhadap kualitas keuangan Bappelitbangda Kabupaten Bandung
Winona Kumara Dewi, Erniwati, Cici Novia Putri (2023)	Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	Untuk menguji dan mengetahui pengaruh pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan teknik analisis linear berganda menggunakan SPSS versi-23.	Penelitian ini menunjukkan, bahwa Perencanaan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, Pengadaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan nilai signifikansi $0,008 < 0,05$, dan Penggunaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai $0,042 < 0,05$. Adapun secara simultan variabel Perencanaan, Pengadaan, dan Penggunaan berpengaruh

				signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.
John Gamara Tangke, Halim, dan Gina Lucita (2015)	Pengaruh Optimalisasi Manajemen Aset Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar	untuk mengetahui pengaruh Optimalisasi Manajemen Aset Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Metode penelitian adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian korelatif.	Hasil penelitian memperlihatkan optimalisasi manajemen aset daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah
Yulpi Poae, Ventje Ilat, Jessy D.L. Warongan (2017)	Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud	untuk menganalisis pengaruh pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud	Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penilaian, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian BMD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan perencanaan BMD memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan

				terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Nadysa Aulia Fitrania, Rita Martini, Yevi Dwitayanti (2022)	Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Palembang	Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dampak penatausahaan asset tetap, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di kota Palembang	Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi berganda	secara simultan, variabel penatausahaan aset, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai adjusted R square sebesar 0,283.
Indra Firmansyah, Rani Tarida Sinambela (2020)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat	bertujuan untuk mengetahui bagaimana Sistem Pengendalian Internal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.	Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif artinya jika sistem pengendalian internal baik maka kualitas laporan keuangan pun akan baik

Tabel 2

2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan pada teori-teori diatas dapat dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Sistem Pengendalian Intern berperan strategis dalam memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipercaya, relevan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Tata kelola keuangan daerah menuntut keteraturan sistem administrasi, terutama dalam pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah. Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah proses administratif yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aset dicatat secara benar, keberadaannya teridentifikasi, nilainya tercatat secara wajar, dan informasi yang disajikan akurat dan lengkap. Menurut Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, penatausahaan barang milik daerah terdiri dari pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan. Penatausahaan barang milik daerah yang dilakukan secara tertib dan akurat akan menghasilkan data barang milik daerah yang valid, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mempengaruhi keandalan informasi pada neraca laporan keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya apabila penatausahaan BMD tidak tertib akan menimbulkan distorsi nilai BMD ketidaksesuaian antara catatan dan kondisi fisik, serta berujung pada opini audit yang kurang baik.

Di samping penatausahaan BMD, faktor lain yang tidak kalah penting dalam menjamin kualitas laporan keuangan adalah efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP yang efektif berfungsi sebagai sistem perlindungan internal yang membantu manajemen dalam mengidentifikasi, mencegah, dan memperbaiki penyimpangan dalam proses pelaporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP merupakan sistem integral yang diterapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai instansi pemerintah secara terus menerus, untuk memberikan keyakinan memadai terhadap tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketataan terhadap peraturan. Kelemahan dalam penerapan SPIP akan membuka peluang terjadinya kesalahan penyajian laporan keuangan, penyimpangan aset, atau ketidaktepatan dalam proses akuntansi pemerintahan. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama beberapa tahun terakhir mengindikasikan adanya kelemahan dalam aspek pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan.

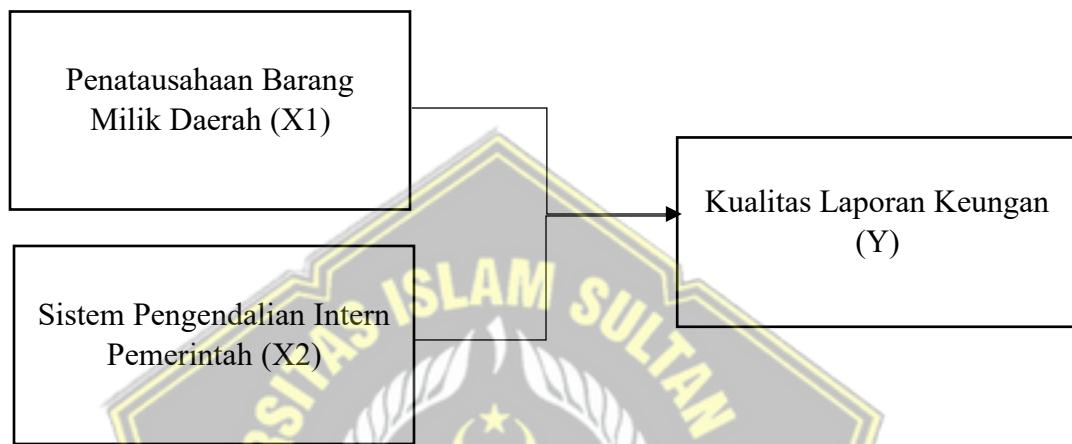
Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan instrument pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang disusun dan disampaikan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan

dapat dipahami. Selain itu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ditentukan oleh baik tidaknya penatausahaan barang milik daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah. Ketidaktertiban dalam pembukuan, keterlambatan inventarisasi, dan ketidaklengkapan pelaporan aset serta tidak didukung oleh sistem pengendalian yang memadai dapat menyebabkan ketidaktepatan penyajian laporan keuangan menjadi kurang andal dan relevan. Hal ini sejalan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian empat belas kali berturut-turut, namun ketika BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, BPK menemukan kelemahan dan ketidakpatuhan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang disajikan. Temuan yang selalu ada setiap tahunnya yaitu terkait pelaksanaan penatausahaan BMD yang belum dilakukan secara optimal seperti pencatatan yang belum lengkap dan tidak akurat serta inventarisasi yang belum dilaksanakan secara optimal.

Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa proses penatausahaan barang milik daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah berperan penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan yang disajikan. Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris sejauh mana penatausahaan barang milik daerah dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dari Uraian diatas, maka kerangka berpikir yang akan digunakan penulis tertuang pada gambar

Kerangka Berpikir



2.4 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir yang sudah dijabarkan diatas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

H_1 : Penatausahaan Barang Milik Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

H_2 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

H₃ : Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah .



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode Penelitian menurut Syafrida Hafni Sahir (2022) merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif menurut Sugiyono (2022) merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme yang digunakan guna meneliti suatu populasi atau sampel tertentu yang pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk melaksanakan pengujian hipotesis yang sudah ditentukan.

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori (explanatory research) yakni penelitian yang berusaha menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen dengan variabel dependen melalui pengajuan hipotesis yang telah dirumuskan. Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini disebut penelitian deskriptif karena terdapat rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri atau variabel

yang berdiri sendiri. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen atau variabel mandiri yaitu penatausahaan barang milik daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah, sedangkan variabel dependen adalah kualitas laporan keuangan.

3.2 Populasi dan sampel

3.2.1 Populasi

Populasi menurut (Sugiyono 2022) merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan peneliti dengan tujuan untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah 126 orang pegawai yang terdiri dari pengurus barang milik daerah, asesor SPIP, dan penyusun laporan keuangan di 42 OPD pada Provinsi Jawa Tengah.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan suatu bagian dari jumlah dan karakteristik yang terdapat pada populasi (Sugiyono 2022). Sugiyono (2022) menyatakan bahwa sampel yang diambil dari sebuah populasi harus benar-benar mampu mewakili populasi. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling.

Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan kriteria khusus terhadap sampel, dan dilakukan berdasarkan pilihan langsung peneliti. Sampel yang diambil adalah 3 orang dari setiap 42 OPD yang menjabat sebagai pengurus barang, asesor SPIP, dan penyusun laporan keuangan, sehingga total terdapat 126 pegawai amatan yang diberikan kuesioner.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama, atau dapat dikatakan pengumpulannya dilakukan sendiri oleh si peneliti secara langsung, berupa wawancara dan hasil pengisian kuesioner (Soeratno dan Arsyad, 2003: 76). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan cara kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menyajikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab sesuai panduan yang telah disediakan.

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder, menurut Sugiyono (2022), data sekunder merupakan sumber data dimana data tersebut tidak diberikan langsung kepada pengumpul data melainkan dapat melalui orang lain atau melalui dokumen. Data sekunder diperoleh dari peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal-jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini

3.4 Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Kuesioner

Metode pengumpulan data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Angket (kuesioner) adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Arikunto, 1922). Tujuan penggunaan metode ini yaitu untuk mengetahui seperti apa pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menyebar kuesioner yang berisi daftar pertanyaan terkait keterkaitan Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan pada responden untuk diisi, setelah itu hasil angket yang telah diisi dan dikumpulkan dilakukan analisis kuantitatif berupa angka. Kuesioner disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian, yaitu penatausahaan barang milik daerah dan kualitas laporan keuangan. Kuesioner ini menggunakan *skala Likert 5* poin dengan pilihan jawaban mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju).

3.4.2 Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan pencarian data-data dan menelusuri dasar-dasar acuan yang erat kaitannya dengan masalah penelitian yang hendak dilakukan, dasar-dasar tersebut tidak terbatas dari satu sumber saja tetapi dapat di cari dari berbagai sumber yang berhubungan dengan

Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperkuat landasan teori, mendukung perumusan indikator kuesioner, serta memberikan pemahaman konseptual mengenai penatausahaan barang milik daerah dan kualitas laporan keuangan. Teori dan konsep dasar tersebut peneliti peroleh dengan cara menelaah berbagai macam sumber seperti buku, jurnal, dan bahan bacaan yang relevan.

3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan skala pengukuran Likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, dalam penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen (Y) dan variabel independen (X). Pada penelitian ini variabel dependennya (Y) adalah Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan variabel independennya (X₁) adalah penatausahaan Barang Milik Daerah dan (X₂) adalah sistem pengendalian intern pemerintah.

3.5.1 Variabel Dependen (Y)

Kualitas Laporan Keuangan merupakan variabel dependen pada penelitian ini. Laporan Keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010, karakteristik laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Empat karakteristik tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

3.5.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen pada penelitian ini terdiri dari Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

1) Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah bertujuan untuk menjamin tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan aset milik pemerintah daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Penatausahaan merupakan kegiatan yang meliputi Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Dimensi pembukuan diukur melalui indikator seperti kelengkapan pencatatan aset, ketepatan waktu pencatatan, penggunaan sistem/aplikasi yang terintegrasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan pencatatan. Dimensi inventarisasi mencakup frekuensi pelaksanaan inventarisasi secara

berkala, kesesuaian antara data fisik dengan data pencatatan, keakuratan hasil inventarisasi, serta tindak lanjut atas hasil inventarisasi tersebut. Sementara itu, dimensi pelaporan mencakup ketepatan waktu penyusunan laporan barang milik daerah, ketersediaan dan aksesibilitas laporan, kesesuaian laporan dengan format standar, serta pemanfaatan laporan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengukuran variabel diukur melalui lima variabel yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

Berdasarkan uraian diatas, maka definisi operasional dan pengukuran variabel dalam penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1.	Kualitas Laporan Keuangan (Variabel Dependen Y)	<p>karakteristik laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. (Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Relevan - Andal - Dapat dibandingkan - Dapat dipahami 	Likert
2.	Penatausahaan Barang Milik Daerah (Variabel	<p>Penatausahaan merupakan kegiatan yang meliputi Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan barang milik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukuan - Inventarisasi - Pelaporan 	Likert

	Independen X1)	daerah sesuai dengan peraturan perundangan.(Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2021)		
3	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Variabel Independen X2)	proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang diselenggarakan secara	<ul style="list-style-type: none"> - lingkungan pengendalian - penilaian risiko - kegiatan pengendalian - informasi dan komunikasi - pemantauan pengendalian intern 	Likert

		menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP No 60 Tahun 2008)		
--	--	---	--	--

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini, statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019).

3.6.2 Uji Kualitas Data

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen kuesioner harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian.

1) Uji Validitas

Uji Validitas data adalah Derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Uji Validitas menyatakan bahwa instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian dapat digunakan atau tidak. Sedangkan uji reliabilitas menyatakan bahwa apabila instrumen yang digunakan beberapa kali digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Seperti telah dijelaskan pada metode penelitian bahwa untuk melihat valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui nilai koefisien korelasi skor butir pernyataan.

Faktor-faktor yang mengurangi validitas data antara lain kepatuhan responden mengikuti petunjuk pengisian kuesioner dan tidak tepatnya formulasi alat pengukur yaitu bentuk dan isi. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu program statistik, dengan kriteria sebagai berikut:

- (1). Jika r_{hitung} positif dan $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka butir pertanyaan tersebut valid.
 - (2). Jika r_{hitung} negatif atau $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.
- 2) Uji Reabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran tanpa bias (bebas kesalahan) dan karena itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam dalam instrumen (Sekaran, 2016). Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner dapat diandalkan, suatu alat ukur dapat diandalkan jika alat ukur tersebut digunakan berulangkali akan memberikan hasil yang relatif sama (tidak berbeda jauh). SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji stastik Cronbach Alpha (a). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60 .

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas yang akan dilaksanakan pada penelitian ini (Ghozali 2018). Apabila segala asumsi terpenuhi dalam regresi maka perkiraan hasil yang dihasilkan akan bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) (Ghozali 2018). *Best* berarti memiliki varians yang paling minimum diantara nilai varians alternative pada setiap model yang ada. *Linear* berarti linier pada variabel acak (Y). *Unbiased* berarti tidak bias atau nilai harapan dari

estimator sama atau mendekati nilai parameter yang sebenarnya (Ghozali 2018).

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali,2013:154). Uji ini dilakukan dengan cara melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal atau grafik. Apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2013:80).

2) Uji Multikolonearitas

Uji Multikolinearitas dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi dapat menemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali 2018). Multikolinieritas dapat menyebabkan variabel-variabel independen menjelaskan varians yang sama dalam mengestimasikan variabel dependen. Cara untuk mendekripsi

adanya multikolinieritas adalah dengan melihat besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor*. Pedoman regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah mempunyai nilai $VIF < 10$ dan mempunyai angka *Tolerance* di atas 0,1.

3) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Danang Sunyoto (2011), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda terdapat perbedaan varian residual antar pengamatan. Apabila varian residual antar pengamatan bersifat konstan, maka disebut sebagai homoskedastisitas, sedangkan apabila varian tersebut berbeda, maka terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode grafis, salah satunya menggunakan *scatterplot*. Heteroskedastisitas dinyatakan tidak terjadi apabila titik-titik pada grafik tersebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu, serta distribusinya berada di atas dan di bawah garis nol pada sumbu Y. Dengan demikian, apabila pola penyebaran residual tidak menunjukkan gejala tertentu, maka model regresi dapat dianggap

memenuhi asumsi homoskedastisitas dan layak digunakan dalam analisis statistik.

3.6.4 Model Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilaksanakan dengan tujuan untuk menaksir pengaruh variabel independen yang lebih dari satu terhadap satu variabel dependen (Ghozali 2018). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah model regresi linear berganda yang persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan

X_1 = Penatausahaan Barang Milik Daerah

X_2 = Sistem Pengendalian Intern

a = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi berganda antara X_1 dan Y

β_2 = Koefisien regresi berganda antara X_2 dan Y

ε = Error term

1) Uji F (Simultan)

Uji statistik F dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjukkan apakah seluruh variabel independen penelitian berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependennya (Ghozali 2018). Pengujian ini dilaksanakan dengan cara mengukur nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi menunjukkan hasil $\leq 0,05$, maka variabel independen bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak dan berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya (Ghozali 2018). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model sudah fit dan dapat digunakan pada pengujian selanjutnya.

2) Uji t (Parsial)

Hasil uji signifikansi parameter individual (Uji Statistik t) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang terdapat dalam persamaan regresi secara individual berpengaruh terhadap nilai variabel dependen (Ghozali, 2013:97). Pengujian ini dilaksanakan dengan cara mengukur nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi menunjukkan hasil $\leq 0,05$ maka hipotesis yang telah diajukan diterima dan berarti bahwa individual variabel

independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak dan berarti bahwa individual variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya (Ghozali 2018). Pengujian hipotesis juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara t hitung dengan t tabel dengan ketentuan:

- (1). Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak (ada pengaruh yang signifikan)
- (2). Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima (tidak ada pengaruh yang signifikan).

3) Uji Koefesien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:95).

Determinasi R^2 mencerminkan kemampuan variabel dependen. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi yang mendekati 0 (nol) berarti kemampuan semua variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas, sedangkan nilai koefisien determinan yang mendekati 1 berarti variabel independent hampir memberikan informasi yang dijelaskan untuk memprediksi variasi variabel dependen.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah administratif di bagian tengah Pulau Jawa yang memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara Jawa Barat dan Jawa Timur. Secara geografis, wilayah ini terletak antara $5^{\circ}40'$ – $8^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan $108^{\circ}30'$ – $111^{\circ}30'$ Bujur Timur, dengan jarak terpanjang mencapai 263 km dari barat ke timur dan 226 km dari utara ke Selatan. Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 3,25 juta hektar, atau sekitar 25,04% dari total luas Pulau Jawa dan 1,70% dari luas keseluruhan wilayah Indonesia. Berdasarkan peruntukannya, sekitar 1 juta hektar (30,80%) merupakan lahan sawah, sedangkan 2,25 juta hektar (69,20%) merupakan lahan non-sawah yang digunakan untuk permukiman, perkebunan, kehutanan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota, dengan ibu kota provinsi berada di Kota Semarang. Letak yang strategis di tengah Pulau Jawa menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu wilayah penting dalam koneksi ekonomi, perdagangan, dan transportasi antarprovinsi di Indonesia.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Gubernur dan Wakil Gubernur yang menjalankan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, pelaksana, dan penunjang. Unsur staf meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang berfungsi sebagai penyusun kebijakan dan koordinator administrasi. Unsur pelaksana dan penunjang meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Daerah, serta Inspektorat, yang masing-masing memiliki peran dalam melaksanakan kebijakan teknis, memberikan pelayanan publik, serta melakukan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berfungsi membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan provinsi, serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Pembentukan dan penataan OPD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang disesuaikan dengan potensi, kebutuhan, dan kemampuan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya memiliki tugas utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pembangunan daerah, dan pelayanan publik. Adapun tugas dan fungsi utama tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah

Pemerintah Provinsi memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan publik yang relevan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, serta melaksanakan kebijakan tersebut secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2) Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi bertindak sebagai pengelola keuangan daerah yang meliputi penyusunan anggaran, pengumpulan pendapatan, serta pengalokasian dana untuk mendukung program dan kebijakan pembangunan daerah secara transparan dan akuntabel.

3) Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur

Pemerintah Provinsi memiliki tanggung jawab dalam pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, irigasi, fasilitas transportasi, dan sarana umum lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah serta menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

4) Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kesehatan

Pemerintah Provinsi berperan dalam peningkatan akses dan mutu pendidikan serta layanan kesehatan, termasuk pengelolaan sekolah menengah atas, perguruan tinggi daerah, rumah sakit, dan puskesmas guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

5) Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemerintah Provinsi mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara menarik investasi, mengembangkan sektor industri, pertanian, perdagangan, dan pariwisata, serta memberikan dukungan kepada pelaku usaha lokal untuk memperkuat ekonomi daerah.

6) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan

Pemerintah Provinsi berkewajiban melindungi dan mengelola sumber daya alam, mengendalikan pencemaran lingkungan, serta melaksanakan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

7) Penegakan Hukum dan Pemeliharaan Keamanan

Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menjaga ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, serta memastikan stabilitas dan keamanan wilayah demi kenyamanan masyarakat.

8) Koordinasi Antar Tingkat Pemerintahan

Pemerintah Provinsi berperan sebagai penghubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyinergikan kebijakan dan program pembangunan nasional agar selaras dengan kebutuhan daerah.

Pemilihan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai objek penelitian didasarkan pada perannya sebagai entitas pemerintahan daerah dengan tata kelola keuangan yang dinilai baik oleh BPK melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga belas tahun berturut-turut. Namun, di sisi lain, laporan hasil

pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam aspek penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kondisi tersebut menjadikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai lokasi yang relevan untuk meneliti sejauh mana penatausahaan aset dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, yang merupakan cerminan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik.

4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gambaran data dengan merinci nilai minimum, nilai maximum, nilai mean, nilai median dan nilai standar deviasi pada suatu variabel penelitian. Hasil uji statistik deskriptif disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Statistik deskritif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Penatausahaan BMD	126	57	80	68.05	5.345
Sistem pengendalian intern pemerintah	126	45	65	54.48	5.336
Kualitas laporan keuangan	126	49	65	56.42	4.622

Tabel diatas menunjukkan bahwa variabel penatausahaan barang milik daerah memiliki nilai minimal sebesar 57, nilai maksimal sebesar 80, nilai rata-rata sebesar 68,05 dan standar deviasi sebesar 5,345. variabel Sistem pengendalian intern pemerintah memiliki nilai minimal sebesar 45, nilai

maksimal sebesar 65, nilai rata rata sebesar 54,48 dan standar deviasi sebesar 5,336. Variabel Kualitas laporan keuangan memiliki nilai minimal sebesar 49, nilai maksimal sebesar 65, nilai rata-rata sebesar 56,42 dan standar deviasi sebesar 4,622.

Berdasarkan tabel uji statistik deskriptif yang telah dilaksanakan, maka dapat diperoleh data sebanyak 126, data yang telah diolah akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Variabel Independen Penatausahaan Barang Milik Daerah (X1) memiliki nilai minimal sebesar 57, nilai maksimal sebesar 80, nilai rata-rata sebesar 68,05 dan standar deviasi sebesar 5,345. Semakin tinggi nilai standar deviasi menandakan bahwa data memiliki tingkat variasi yang lebih besar. Dengan demikian, hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel independen Penatausahaan Barang Milik Daerah memiliki sebaran data yang lebih luas dibandingkan variabel lainnya.
- 2) Variabel Independen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2) dari data yang diperoleh sebanyak 126 memiliki nilai minimal sebesar 45, nilai maksimal sebesar 65, nilai rata-rata sebesar 54,48, dan standar deviasi sebesar 5,336. Dengan hasil tersebut diatas menunjukkan bahwa variabel independen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki sebaran data yang normal
- 3) Variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan (Y) memiliki nilai minimal sebesar 49, nilai maksimal sebesar 65, nilai rata-rata sebesar 56,42, dan

standar deviasi sebesar 4,622. Hal ini menunjukan bahwa variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan memiliki sebaran data yang normal.

4.3 Hasil Analisis Data

4.3.1 Hasil Uji Kualitas Data

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang telah ditetapkan dalam penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya diuji kualitasnya sebelum dilakukan analisis lebih lanjut karena kebenaran data yang diperoleh menentukan kualitas hasil penelitian. Pengujian kualitas data mencakup uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan ketepatan serta konsistensi instrumen penelitian.

4.3.1.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menilai sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang seharusnya diukur secara tepat. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan teknik *korelasi product moment*, yaitu metode statistik yang mengukur tingkat keeratan hubungan antara dua variabel yang memiliki skala pengukuran interval atau rasio. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Hasil Uji Validasi

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Penatausahaan Barang Milik Daerah (X1)	X1.1	0,412	0,174	Valid
	X1.2	0,401	0,174	Valid
	X1.3	0,469	0,174	Valid
	X1.4	0,603	0,174	Valid
	X1.5	0,599	0,174	Valid
	X1.6	0,554	0,174	Valid
	X1.7	0,447	0,174	Valid
	X1.8	0,573	0,174	Valid
	X1.9	0,552	0,174	Valid
	X1.10	0,461	0,174	Valid
	X1.11	0,573	0,174	Valid
	X1.12	0,579	0,174	Valid
	X1.13	0,284	0,174	Valid
	X1.14	0,558	0,174	Valid
	X1.15	0,535	0,174	Valid
	X1.16	0,550	0,174	Valid
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)	X2.1	0,494	0,174	Valid
	X2.2	0,549	0,174	Valid
	X2.3	0,492	0,174	Valid
	X2.4	0,685	0,174	Valid
	X2.5	0,637	0,174	Valid
	X2.6	0,503	0,174	Valid
	X2.7	0,655	0,174	Valid
	X2.8	0,614	0,174	Valid
	X2.9	0,660	0,174	Valid
	X2.10	0,682	0,174	Valid
	X2.11	0,530	0,174	Valid
	X2.12	0,473	0,174	Valid
	X2.13	0,418	0,174	Valid
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Y1	0,508	0,174	Valid
	Y2	0,612	0,174	Valid
	Y3	0,492	0,174	Valid
	Y4	0,641	0,174	Valid
	Y5	0,607	0,174	Valid
	Y6	0,601	0,174	Valid
	Y7	0,567	0,174	Valid
	Y8	0,547	0,174	Valid
	Y9	0,579	0,174	Valid

	Y10	0,517	0,174	Valid
	Y11	0,517	0,174	Valid
	Y12	0,496	0,174	Valid
	Y13	0,546	0,174	Valid

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai r hitung yang lebih besar daripada r tabel. Nilai r tabel diperoleh dari tabel korelasi *product moment* dengan jumlah responden (N) sebanyak 126 orang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pada instrumen penelitian dinyatakan valid

4.3.1.2 Hasil Uji Reabilitas

Uji reliabilitas instrumen dilakukan untuk melihat konsistensi angket sehingga dapat diandalkan untuk mengukur variabel walaupun dilakukan berulang-ulang. Jika nilai cronbach's alpha > 0.60 , maka variabel reliabel, jika nilai cronbach's alpha < 0.60 , maka variabel tidak reliabel. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas yang telah dilakukan dapat dilakukan pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Alpha cronbach's	Keterangan
Penatausahaan barang milik daerah	0,806	Reliabel
Sistem pengendalian intern pemerintah	0,826	Reliabel
Kualitas laporan keuangan	0,815	Reliabel

Hasil uji reliabilitas cronbach's alpha menunjukkan bahwa nilai cronbach's alpha lebih dari 0,6 sehingga seluruh instrumen reliabel dan dapat dilanjutkan pada analisis data.

4.3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, diperlukan pengujian terhadap asumsi-asumsi klasik guna memastikan bahwa model yang digunakan memenuhi kriteria statistik. Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengidentifikasi ada tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan dasar regresi, sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat diinterpretasikan secara valid dan reliabel. Pengujian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, ketiga uji tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa data terdistribusi normal, tidak terdapat hubungan yang kuat antar variabel independen, varians residual bersifat konstan, serta tidak terjadi korelasi antar residual.

Dengan terpenuhinya seluruh asumsi klasik tersebut, maka model regresi yang digunakan dapat dianggap layak untuk menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian ini.

4.3.2.1 Uji Normalitas

Dalam penelitian ini uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi variabel dependen

dan independen memiliki distribusi normal. Uji normalitas dilakukan menggunakan rumus Kolmogorov Smirnov menggunakan SPSS 26.0 for windows. Hasil uji normalitas dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas

Variabel	Sig	Keterangan
Independent * Dependent	0,050	Normal

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov bahwa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0,050 > 0,05$ yang artinya bahwa pada seluruh variabel data berdistribusi normal, maka dari itu model regresi dapat digunakan.

4.3.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi dapat menemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan VIF. Jika nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF $< 10,0$ maka tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Penatausahaan barang milik daerah	0,399	2,503
Sistem pengendalian intern pemerintah	0,399	2,503

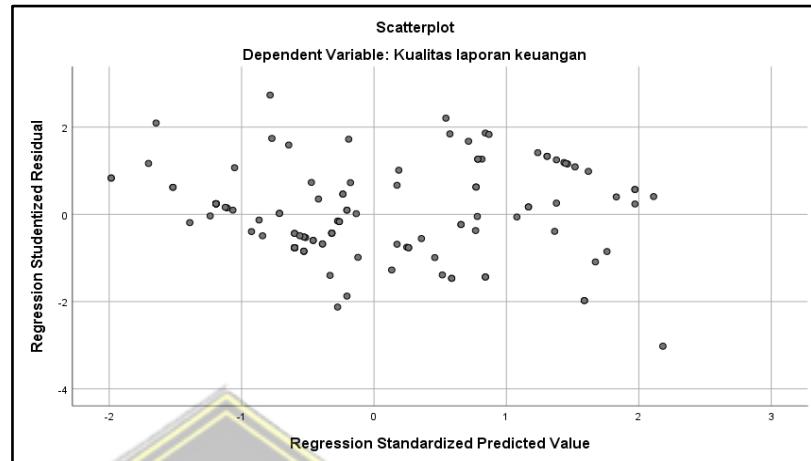
Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada tabel, seluruh variabel memiliki nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

4.3.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *scatterplot* untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varians dari residual pada model regresi. Suatu model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas, karena hal tersebut dapat mengindikasikan ketidakkonsistenan varians error yang berpotensi menurunkan keandalan estimasi.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan hasil pengujian yang divisualisasikan melalui diagram scatterplot, terlihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak di sekitar garis horizontal tanpa membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari masalah heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi klasik yang diperlukan untuk analisis regresi linier berganda.

4.3.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan maupun parsial. Analisis ini bertujuan untuk menguji hubungan kausal antara beberapa variabel bebas yang diasumsikan memengaruhi variabel terikat, sehingga dapat memberikan gambaran empiris mengenai

arah dan kekuatan pengaruh tersebut. Sebelum dilakukan pengujian regresi, model terlebih dahulu harus memenuhi beberapa asumsi dasar, yaitu bahwa data residual terdistribusi secara normal, terdapat hubungan yang bersifat linier antara variabel bebas dan variabel terikat, tidak terjadi gejala multikolinearitas, serta tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model. Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa seluruh persyaratan tersebut telah terpenuhi, sehingga model regresi linier berganda dalam penelitian ini dinyatakan layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis. Adapun hasil analisis regresi linier berganda yang menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.6 Regresi Linier Berganda

	B	Beta
Constan	15,551	
Penatausahaan barang milik daerah	0,245	0,284
Sistem pengendalian intern pemerintah	0,444	0,513

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai konstanta sebesar **15,551** menunjukkan bahwa apabila variabel Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dianggap tidak berpengaruh atau bernilai nol, maka nilai Kualitas Laporan Keuangan akan tetap sebesar 15,551. Selanjutnya, nilai koefisien regresi untuk variabel Penatausahaan Barang

Milik Daerah sebesar 0,245 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1% dalam penatausahaan Barang Milik Daerah akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,245 dengan arah hubungan yang positif. Hal ini berarti semakin baik penatausahaan Barang Milik Daerah, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, nilai koefisien regresi untuk variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar 0,444 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% dalam sistem pengendalian intern akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,444. Koefisien yang bernilai positif ini menggambarkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern yang efektif berkontribusi secara positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, kedua variabel independen tersebut memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan, yang berarti semakin baik pengelolaan Barang Milik Daerah dan sistem pengendalian intern yang diterapkan, maka semakin andal dan berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Persamaan regresi ketiga variabel sebagai berikut.

$$Y = a + Bx,$$

$$Y = 15,551 + 0,245X_1 + 0,444X_2 + e$$

4.3.4 Hasil Uji Hipotesis

4.3.4.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat melalui tabel R square yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.754 ^a	.568	.561	3.061
a. Predictors: (Constant), Sistem pengendalian intern pemerintah, Penatausahaan BMD				

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, nilai **R** sebesar 0,754 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Kualitas Laporan Keuangan. Sementara itu, nilai R Square sebesar 0,568 berarti bahwa sebesar 56,8% variasi Kualitas Laporan Keuangan dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen tersebut, sedangkan sisanya sebesar 43,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi memiliki kemampuan yang cukup baik dalam

menjelaskan pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah.

4.3.4.2 Hasil Uji F Simultan

Uji F simultan dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama seluruh variabel independent terhadap variabel dependen. Uji F simultan dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05 atau dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika nilai F hitung $>$ F tabel atau signifikansi $\leq 0,05$ maka H_a diterima begitupun sebaliknya. Hasil uji F parsial dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 4.8 Hasil Uji F Simultan

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1517.873	2	758.936	80.974	.000 ^b
	Residual	1152.833	123	9.373		
	Total	2670.706	125			
a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan						
b. Predictors: (Constant), Sistem pengendalian intern pemerintah, Penatausahaan BMD						

Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa nilai F tabel sebesar 3,92 diperoleh dari rumus $F.INV.RT (probability;$

deg_freedom1; deg_freedom2) dengan ketentuan probability = 0,05, *deg_freedom1* (jumlah variabel – 1), dan *deg_freedom2* (jumlah sampel – jumlah variabel). Nilai F hitung sebesar 80,974 lebih besar dari F tabel yaitu 3,92, serta nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian H_3 diterima, yang berarti Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

4.3.4.3 Hasil Uji t Parsial

Uji t parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen. Uji t parsial dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05 atau dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Jika nilai t hitung > t tabel atau signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima, namun apabila sebaliknya maka hipotesis ditolak. t tabel diperoleh dengan rumus $(a/2 ; df residual) = (0,05/2 ; 123) = 0,025 ; 123 = 1,979$. Hasil uji t parsial dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji t Parsial

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.551	3.500		4.444	.000
	Penatausahaan BMD	.245	.081	.284	3.025	.003
	Sistem pengendalian intern pemerintah	.444	.081	.513	5.468	.000
a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan						

Berdasarkan hasil uji parsial yang ditampilkan pada tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi untuk variabel Penatausahaan Barang Milik Daerah sebesar 0,003, yang lebih kecil dari 0,05, serta nilai t hitung sebesar 3,025 yang lebih besar dari t tabel 1,979. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Penatausahaan Barang Milik Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Selanjutnya, variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05, dan nilai t hitung sebesar 5,468 yang juga lebih besar dari t tabel 1,979. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji t, menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel penatausahaan barang milik daerah (X_1) sebesar 3,025 dan t tabel sebesar 1,979, dimana nilai t hitung $>$ t tabel dan nilai sig 0,003 $<$ 0,05.

Maka dapat disimpulkan bahwa H_1 **diterima**, yang berarti variabel penatausahaan barang milik daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini memperkuat dasar teoritis dalam proposal penelitian yang menyatakan bahwa penatausahaan yang baik berperan penting dalam mewujudkan laporan keuangan yang andal dan transparan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, penatausahaan Barang Milik Daerah merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses penatausahaan yang tertib memastikan informasi terkait nilai, kondisi, dan status hukum aset daerah dapat disajikan secara akurat dalam laporan keuangan. Dalam konteks Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tertib penatausahaan BMD menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas keuangan,

terlebih mengingat hasil audit BPK yang masih menemukan kelemahan administratif dalam pencatatan dan inventarisasi aset.

Dari sudut pandang *Teori Stewardship*, hasil penelitian ini menegaskan bahwa aparatur pemerintah berperan sebagai *steward* (pengelola) yang bertanggung jawab mengelola sumber daya publik demi kepentingan masyarakat, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Penatausahaan aset yang baik mencerminkan sikap tanggung jawab, integritas, dan kepatuhan aparatur terhadap prinsip *good governance*, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maulana (2022), Widiati et al. (2021), Ahmad Irfansyah et al. (2022), serta Silvi Fitria (2022), yang secara konsisten menunjukkan bahwa penatausahaan barang milik daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa ketertiban dalam pembukuan, keakuratan inventarisasi, serta ketepatan pelaporan aset daerah merupakan faktor kunci dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dicapai melalui

penguatan penatausahaan Barang Milik Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan

4.4.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 5,468 dan t tabel sebesar 1,979, dimana nilai t hitung $>$ t tabel dan nilai sig 0,000 $>$ 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_2 **diterima**, yang berarti variabel sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, SPIP merupakan proses yang menyeluruh dan berkesinambungan yang melibatkan pimpinan serta seluruh pegawai dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, serta taat pada ketentuan perundang-undangan. Penerapan SPIP yang matang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sistem manajemen risiko yang mendukung pengamanan aset, peningkatan transparansi, dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam konteks penelitian ini, hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berperan penting dalam menjaga kualitas informasi keuangan yang disajikan. SPIP yang efektif memungkinkan pemerintah daerah mendeteksi potensi kesalahan atau penyimpangan sejak dini, memperkuat proses audit internal, serta memastikan bahwa pengelolaan keuangan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi publik. Hal ini selaras dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Indra Firmansyah et al. (2020) yang menemukan bahwa penerapan sistem pengendalian intern yang baik berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

Jika dikaitkan dengan *Teori Stewardship*, temuan ini memperkuat pandangan bahwa aparatur pemerintah berperan sebagai *steward* yang mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat luas. Melalui penerapan SPIP, para aparatur memperlihatkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), di mana setiap proses pengendalian internal dijalankan untuk menjamin keandalan laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya mendukung teori dan temuan terdahulu, tetapi juga menunjukkan bahwa penguatan SPIP merupakan

faktor strategis dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.4.3 Pengaruh Pengaruh Secara Simultan Antara Penatausahaan BMD Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 80,974, yang lebih besar dibandingkan dengan F_{tabel} sebesar 3,92, serta nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan layak dan memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan hubungan antara kedua variabel independen terhadap variabel dependen.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nadya Aulia et al. (2022), yang membuktikan bahwa secara simultan variabel penatausahaan aset, sistem pengendalian internal, serta kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan tidak hanya bergantung pada satu aspek, tetapi merupakan hasil sinergi antara pengelolaan aset yang tertib,

sistem pengendalian yang efektif, dan kapasitas aparatur yang profesional dalam menjalankan fungsi akuntabilitas publik.

Keterkaitan hasil ini juga sejalan dengan *teori Stewardship*, yang menekankan bahwa aparatur pemerintah sebagai *steward* memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mengelola sumber daya publik secara transparan dan akuntabel demi tercapainya tujuan organisasi. Dalam konteks ini, penatausahaan Barang Milik Daerah yang baik serta sistem pengendalian intern yang terintegrasi berperan sebagai bentuk nyata dari komitmen aparatur dalam menjaga keandalan informasi keuangan dan mencegah penyimpangan pengelolaan aset daerah.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) melalui pengelolaan Barang Milik Daerah dan sistem pengendalian intern yang kuat merupakan faktor krusial dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Hal ini sekaligus mencerminkan tercapainya nilai-nilai stewardship, di mana aparatur tidak hanya berperan sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai penjaga integritas dan akuntabilitas keuangan daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penatausahaan aset daerah melalui kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan, maka semakin tinggi pula tingkat keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Temuan ini sejalan dengan teori *Stewardship*, di mana aparatur pemerintah berperan sebagai pengelola sumber daya publik yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengelola aset daerah secara transparan serta akuntabel.
- 2) Sistem Pengendalian Intern Pemeritah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang artinya semakin efektif pelaksanaan pengendalian intern oleh instansi pemerintah, semakin baik kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. SPIP yang baik mampu memastikan kepatuhan terhadap peraturan, efektivitas operasional, dan keamanan aset daerah. Hal ini konsisten dengan teori *Stewardship* yang menekankan pentingnya

tanggung jawab moral dan profesional pegawai pemerintah untuk menjaga keandalan pelaporan publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

- 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Sistem Pengendalian Intern
- Pemerintah secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, hal ini berarti bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sinergi antara penatausahaan aset yang tertib dan pengendalian intern yang kuat berkontribusi pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta pelaporan keuangan yang andal dan akuntabel. Hasil ini sejalan dengan teori *Stewardship* dan penelitian sebelumnya oleh Nadya Aulia et al. (2022) yang menyatakan bahwa kombinasi antara sistem pengelolaan aset, pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan antara lain:

- 1) Penelitian ini hanya berfokus pada dua variabel independen, yaitu Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sehingga belum menggambarkan secara menyeluruh faktor-

faktor lain yang juga berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, seperti sumber daya manusia, teknologi informasi, dan budaya organisasi.

- 2) Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan metode *self-assessment*, sehingga terdapat kemungkinan munculnya bias subjektivitas dari responden dalam memberikan jawaban

5.3 Saran Penelitian

Berdasarkan adanya keterbatasan pada penelitian ini, maka terdapat saran sebagai berikut:

- 1) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi empiris dalam pengembangan ilmu manajemen publik dan akuntansi sektor pemerintahan, khususnya terkait penerapan teori *Stewardship* dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi bukti bahwa transparansi dan akuntabilitas pemerintah tidak terlepas dari keberhasilan sistem pengelolaan aset dan pengendalian intern yang baik.

- 2) Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Disarankan agar terus memperkuat sistem penatausahaan Barang Milik Daerah dengan melakukan pembaruan data aset secara berkala, meningkatkan digitalisasi atas penatausahaan barang milik daerah, serta meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengelolaan aset. Selain itu, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu ditingkatkan melalui pengawasan

berjenjang, audit internal yang efektif, serta budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan tanggung jawab publik.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel lain yang juga berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, atau komitmen organisasi, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor penentu kualitas pelaporan keuangan di sektor publik.



DAFTAR PUSTAKA

- Fitrania, Nadysa Aulia, Rita Martini, Yevi Dwitayanti, Jurusan Akuntansi, and Politeknik Negeri Sriwijaya. 2022. "Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap , Sistem Pengendalian Internal , Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Palembang." 2(2):115–25.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Irfansyah, Ahmad, and Jumania Septariani. 2023. "PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN (Studi Kasus Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyyah* 6(1):65. doi:10.51877/jiar.v6i1.260.
- Maulana, Ela Sintya. 2022. "Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang."
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Widiati, Wini, Arie Apriadi Nugraha, and Ira Novianty. 2021. "Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Bandung The Effect of Administration Fixed Assets on the Quality of Financial Statements at Regional Work Units in Bandung Regency." 1(2):253–60.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Febrianti Sukma. 2016. Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, Universitas STIE Pontianak

Juwita, dkk (2017). “Pengaruh Penatausahaan dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara DKI Jakarta)”. Universitas Telkom

Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D. Alfabeta, Bandung
 Fitrania, Nadysa Aulia, Rita Martini, Yevi Dwitayanti, Jurusan Akuntansi, and Politeknik Negeri Sriwijaya. 2022. “Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Palembang.” 2(2):115–25.

Ghozali, I. 2018. *Applikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Irfansyah, Ahmad, and Jumania Septariani. 2023. “PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN (Studi Kasus Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin).” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyyah* 6(1):65.
 doi:10.51877/jiar.v6i1.260.

Maulana, Ela Sintya. 2022. “Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.”

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.

Widiati, Wini, Arie Apriadi Nugraha, and Ira Novianty. 2021. “Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Bandung The Effect of Administration Fixed Assets on the Quality of Financial Statements at Regional Work Units in Bandung Regency.” 1(2):253–60.

Eksandy, A., Sari, R. U., & Rengganingsih, V. D. (2020). Business Strategy , Knowledge Management Dan Corporate Social. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, E-ISSN 2549-791X 93*, 4(1), 80–93.
<http://jurnal.umt.ac.id/index.php/competitive/article/view/2327>

Saputra, A. W., Suwandi, M., & Suhartono. (2020). ISAFIR; Islamic Accounting and Finance Review. ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review, 1(2), 40–55. www.kemenkeu.go.id

